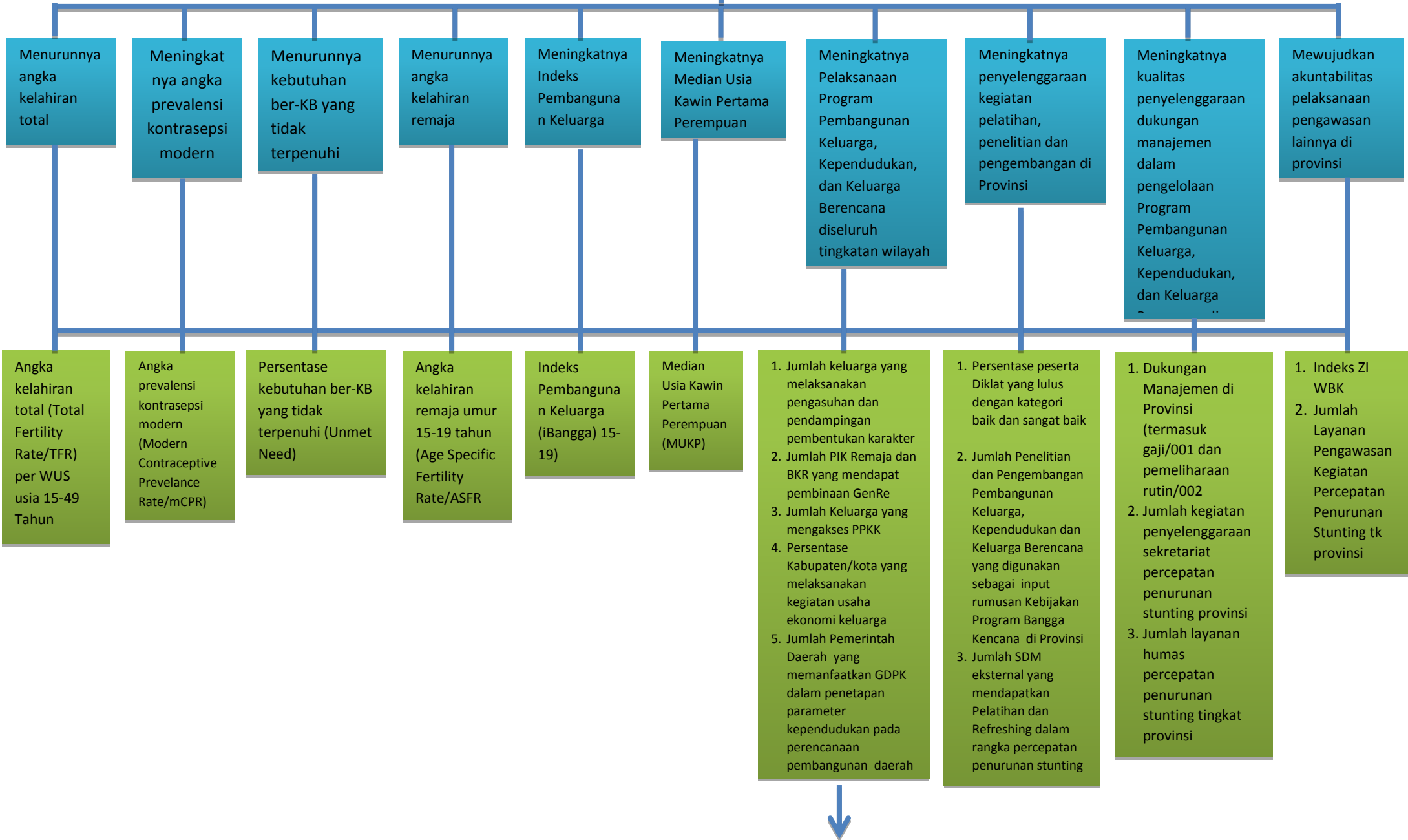


POHON KINERJA

BAGIAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA PERWAKILAN



6. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung
7. Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
8. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
9. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
10. Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan
11. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
12. Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)
13. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
14. Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
15. Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan
16. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
17. Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
18. Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
19. Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
20. Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota
21. Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.
22. Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK
23. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
24. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
25. Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
26. Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan
27. Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana
28. Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi
29. Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting
30. Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi
31. Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes
32. Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
33. Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi
34. Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan
35. Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)

Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung

KSPK

DALDUK

KBKR

ADPIN

LALITBANG

SEKRETARIAT -

PENGAWASAN

LALITBANG

- 1. 15 Kab/Kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam bidang pembangunan keluarga
- 2. 217.118 Keluarga dengan Baduta yang mendapat fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
- 3. 1.111 kelompok PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu
- 4. 528 kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia
- 5. 45 kelompok UPPKA percontohan di kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga

- 1. 5 Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- 2. 45 rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi kampung KB percontohan
- 3. 15 bimtek intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan bangga kencana di kampung KB berkualitas
- 4. 15 kelompok masyarakat ikut serta dalam rangka penurunan stunting
- 5. Dua rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi

- 1. 509 Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
- 2. 509 Faskes yang terpenuhi ketersediaan alokon
- 3. Pelaksanaan 15 layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes

- 1. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kepentingan, KIE, serta penyediaan data dan informasi keluarga
- 2. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI) sebanyak 15 Layanan
- 3. Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota sebanyak 16 Kegiatan
- 4. Satu layanan Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi
- 5. Satu layanan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota

- 1. 90 Orang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan program bangga kencana tingkat provinsi dan kab/kota
- 2. 18. 297 orang Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting
- 3. Satu rekomendasi kebijakan Evaluasi Program Bangga Kencana

- 1. Satu layanan organisasi dan tata kelola internal
- 2. Satu layanan perkantoran
- 3. Satu layanan sarana internal
- 4. Satu Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
- 5. Satu layanan Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi

- 1. Satu dokumen layanan audit internal
- 2. Satu layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi

- 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 26 Orang

1. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan karakter di 15kab/kota
2. Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) sebanyak 3 PPKS
3. Promosi dan KIE 1000 HPK di 15 kab/kota
4. Satu laporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK
5. Peningkatan komitmen dengan 1 pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting
6. 1.111 PIK remaja dan BKR yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
7. Peningkatan komitmen dengan 1 pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting
8. Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di 528 Kelompok BKL
9. Penguatan ekonomi keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di 45 Kelompon UPPKA Percontohan di kampung KB

1. Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Dan 10 kab/kota
2. Koordinasi pemanfaatan dan – engintegrasian data kependudukan dalam perencanaan di 1 Provinsi dan 5 kab/kota pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas bimtek perencanaan dan pembangunan daerah di 1 Provinsi dan 5 kab/kota
4. Peningkatan system registrasi 134 rumah data kependudukan di Kampung KB
5. Penguatan tata kelola 119 rumah data kependudukan di Kampung KB
6. Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif
7. Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan 15 kab/kota (formal, non formal dan informal)
8. Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota

1. Pengelolaan kebijakan dan strategi sebanyak 1 Dokumen
2. Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi 776 Tenaga Kesehatan KB
3. Satu dokumen penyerasian kebijakan dan penguatan program pelayanan KB pria
4. Fasilitasi peningkatan dan pembinaan kepesertaan KB di 9 kab/kota
5. Satu dokumen penyerasian analisis dan evaluasi capaian kesertaan KB di kab/kota
6. Penggerakan pelayanan KB MKJP dan pencabutan implan serta komplikasi dan kegagalan di 15 Kab/Kota
7. Integrasi penggarapan program dan pelayanan KB bersama 3 mitra kerja di wilayah gaicilitas
8. Peningkatan implementasi penggerakan promosi dan kesehatan reproduksi di 2 Kab/Kota wilayah resiko tinggi
9. Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK di 8 Kab/Kota
10. Penguatan Peran 9 Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

1. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan di 14 mitra aktif dalam penggerakan program bangga kencana
2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan program bangga kencana sejumlah 7 mitra aktif
3. Peningkatan kelembagaan pada 1 kab/kota yang memiliki dinas pengendalian penduduk dan KB yang utuh
4. Pengembangan kebijakan dan dukungan provinsi untuk advokasi, promosi, dan KIE program bangga kencana di Provinsi
5. Peningkatan promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak, elektronik, online, serta media luar ruang sebanyak 11 frekuensi
6. 5 kegiatan Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu ProgramBangga Kencana
7. Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB sebanyak 15 Dokumen
8. Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (14.043 PPKBD dan Sub PPKBD)

1. 90 orang yang mengikuti Pelatihan Teknis Program Bangga Kencana
2. 18.297 orang mengikuti Pelatihan dan Pendalaman
3. Satu laporan Pelaksanaan evaluasi dan analisis program Bangga Kencana untuk rekomendasi kebijakan

1. Satu kegiatan pengelolaan ortala dan reformasi birokrasi
2. Pengelolaan keuangan dan BMN 1 Satker
3. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian sebanyak 18 pegawai
4. Satu dokumen Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran
5. Gaji dan Tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi sebanyak 13 bulan layanan
6. Operasional dan pemeliharaan kantor sebanyak 12 bulan layanan
7. 2 unit Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran
8. Satu kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi
9. 1 kegiatan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi

1. Satu dokumen Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi
2. Satu dokumen Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi

1. Pelatihan bagi Fungsional Tertentu sebanyak 26 orang

- 9. Penguatan 11 Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB
- 10. Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna di 45 Kampung KB
- 11. Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga di 15 Kab/Kota
- 12. 45 Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung kb
- 13. Studi kasus dan pembelajaran (provinsi) sebanyak 2 laporan

- 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon) sebanyak 1 dokumen
- 12. Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting di 15 Kab/Kota
- 13. Koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di 509 faskes

- 9. 15 kab/kota ikut serta dalam Fasilitas Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan karakter
- 10. Pembinaan Penguatan Pelaksanaan 91 Mekanisme Operasional (MEKOP)
- 11. Penguatan tupoksi dan kinerja 540 IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB
- 12. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi data dan informasi Program Bangga Kencana di 15 Kab/Kota
- 13. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan jaringan STIK program Bangga Kencana Provinsi
- 14. Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi, Dokumentasi dan pengelolaan PPID Provinsi
- 15. Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia di 15 Kab/Kota



- 16 SATGAS
Percepatan
Penurunan
Stunting Provinsi
dan 15 kab/kota
- 17 Verifikasi dan
validasi data
kasus stunting
dan keluarga
resiko stunting
sebanyak 1
dokumen
- 18 Kampanye
Percepatan
Penurunan
Stunting
sebanyak 161
Kegiatan

Bandar Lampung, 24 Maret 2022

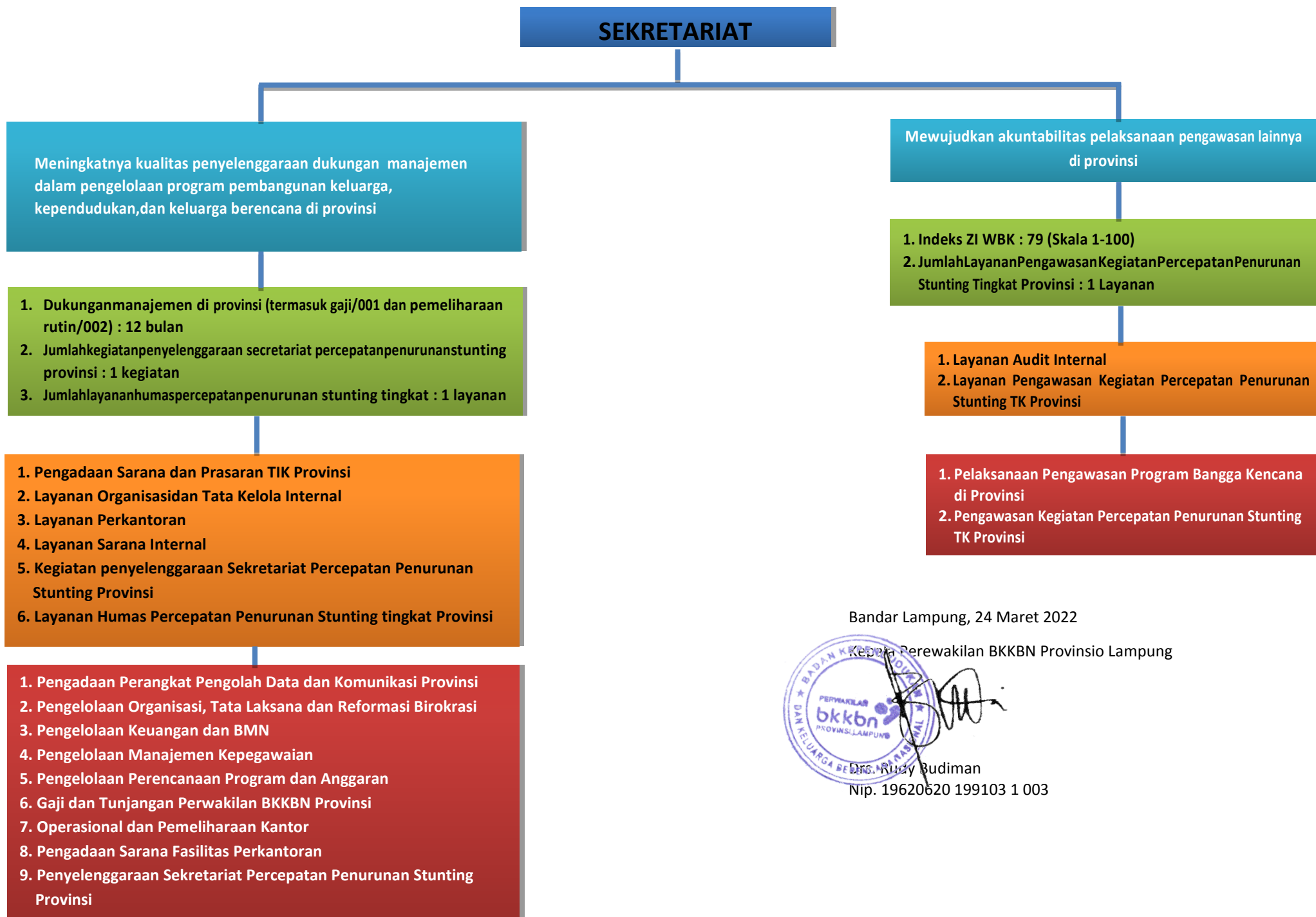
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung



Drs. Rudy Budiman

Nip. 19620620 199103 1 003

POHON KINERJA
SEKRETARIAT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

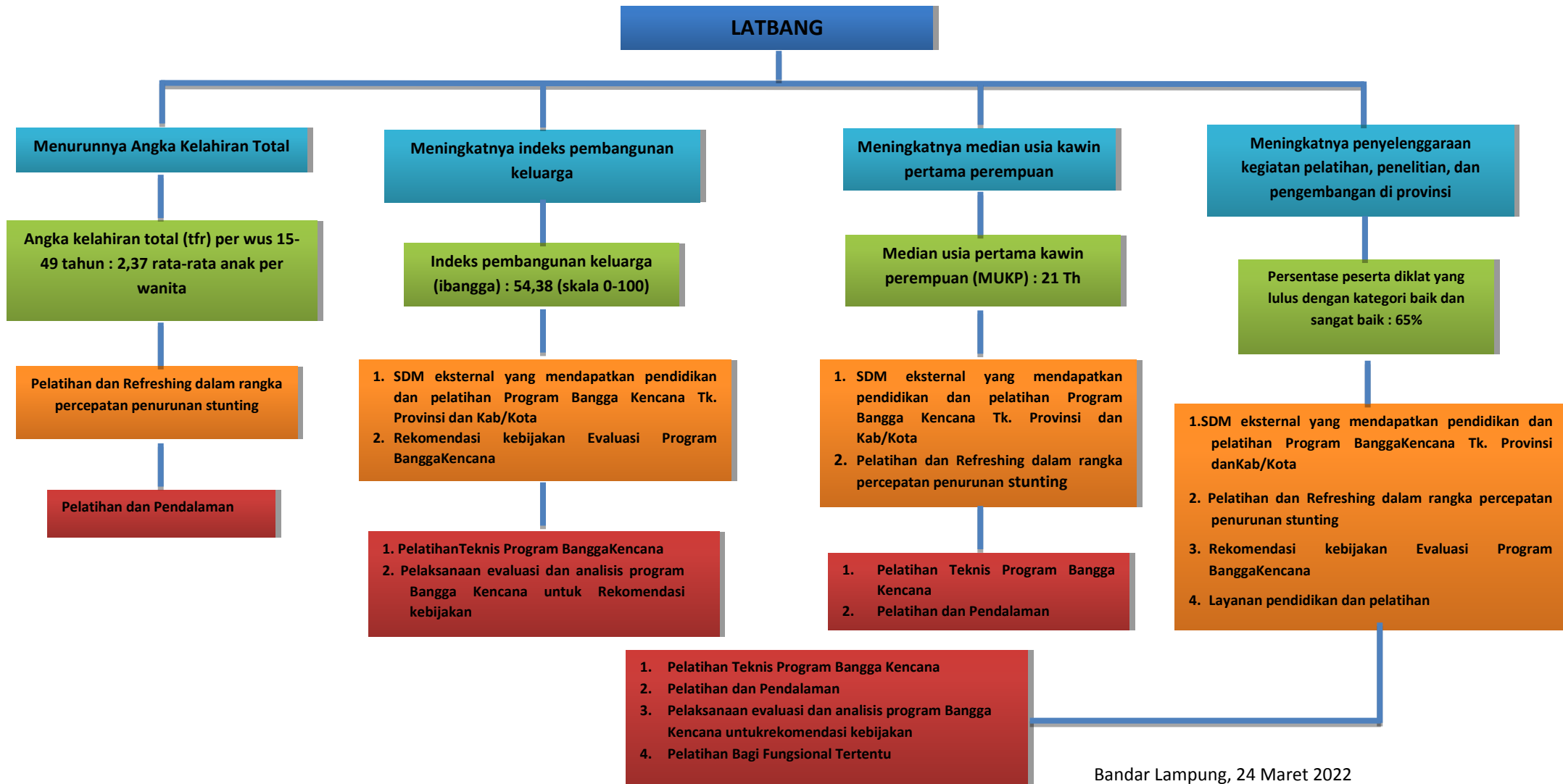


Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung


Drs. Rudy Budiman
Nip. 19620620 199103 1 003

POHON KINERJA LATBANG PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung

Drs. Rudy Budiman
 Nip. 19620620 199103 1 003

POHON KINERJA DALDUK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

PENGENDALIAN PENDUDUK

Menurunnya Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total (tfr) per wus 15-49 tahun : 2,37 rata-rata anak per wanita

Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

1. Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan.
2. Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

1. Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan.179
2. Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah 180
3. Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan 182
4. Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan 183
5. Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif 184
6. Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota 186
7. Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB 187
8. Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna
9. Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana
10. Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)

Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Indeks pembangunan keluarga (ibangga) : 54,38 (skala 0-100)

Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

1. Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif
2. Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)
3. Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Diseluruh Tingkatan Wilayah

1. Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah : 1 Prov & 5 Kab/Kota
2. Jumlah rumah data kependudukan paripurna yang terbentuk di kampung KB : 101
3. Jumlah kelompok kerja Bangsa Kencana provinsi dan kab/kota yang efektif : 1 Prov & 5 Kab/Kota
4. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi : 3 Jalur (Formal, nonformal dan informal)
5. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan system peringatan dini pengendalian penduduk : 1 Prov & 5 Kab/Kota
6. Jumlah kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu di kependudukan : 230 Kampung KB
7. Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan : 1 Prov & 5 Kab/Kota
8. Jumlah rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan : 45 Kampung KB
9. Kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana: 15 Kab/Kota
10. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi : 2 rekomendasi kebijakan

1. Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2. Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
3. Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi
4. Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting
5. Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB

Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung

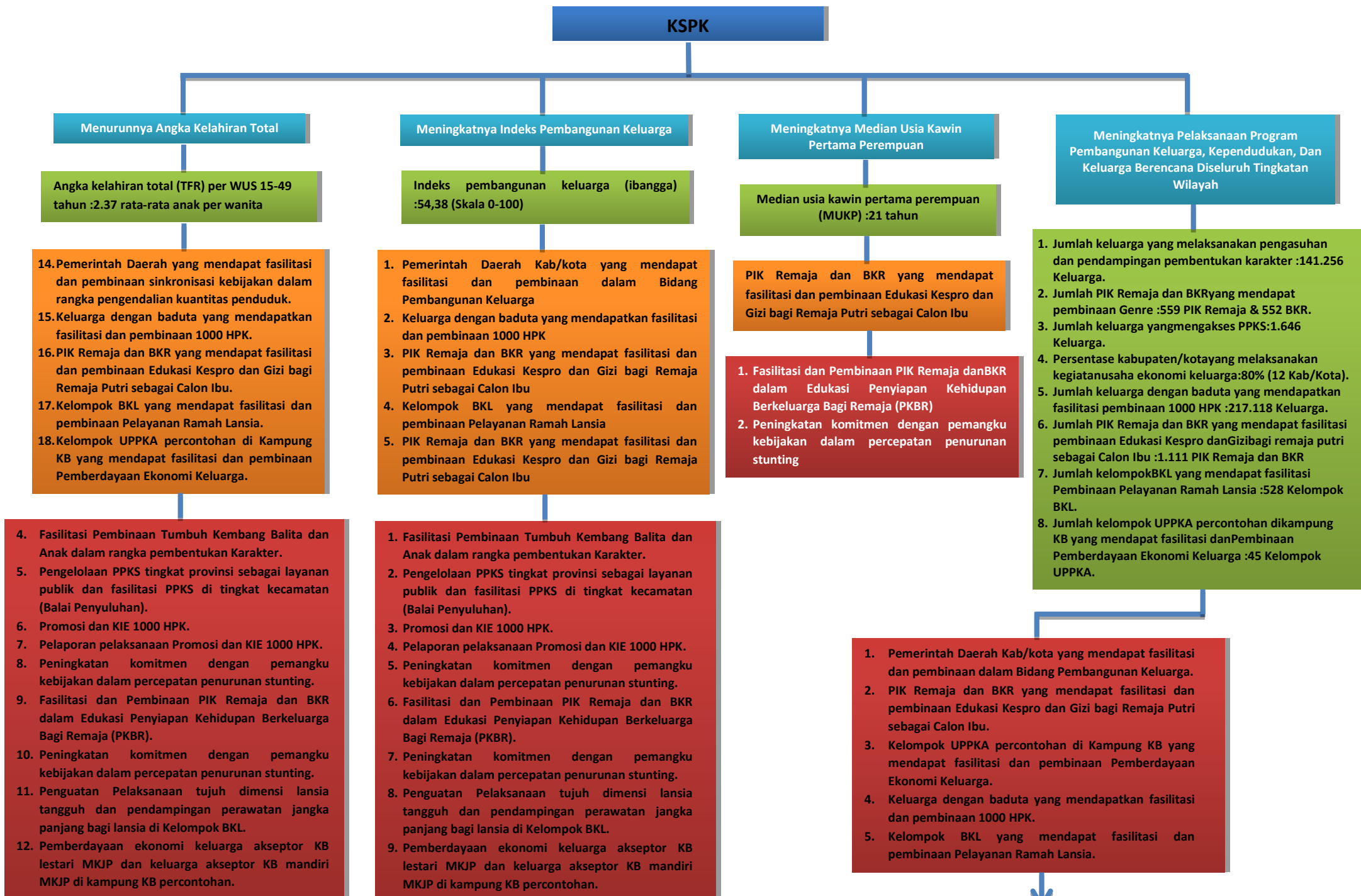


Dr. Rucy Budiman

Nip. 19620620 199103 1 003

POHON KINERJA

KSPK PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



1. Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter.
2. Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).
3. Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan).
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga 437,715,000 akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan.
5. Promosi dan KIE 1000 HPK.
6. Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK.
7. Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.
8. Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL.

Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung



Drs. Rudy Budiman
Nip. 19620620 199103 1 003

POHON KINERJA

KBKR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



1. Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes.
3. Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon).

1. Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes.
3. Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon).
4. Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di faskes.
5. Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB.
6. Penyerasian Kebijakan dan Penguatan Program Pelayanan KB Pria.
7. Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan Implan serta Komplikasi dan Kegagalan.
8. Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Galciltas.
9. Koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes.
10. Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria.
11. Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota.
12. Peningkatan implementasi penggerakan promosi dan konseling

Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung



Drs. Rudy Budiman
Nip. 19610620 199103 1 003

POHON KINERJA

ADPIN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

ADPIN

Menurunnya angka kelahiran total

Angka kelahiran total (tfr) per wus 15-49 tahun :
2,37 rata-rata anak per wanita

1. Pemerintah Daerah mendapat fasilitasi pembinaan/penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (*stakeholders*), KIE, serta penyediaan data informasi dan keluarga
2. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
3. Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
4. Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi
5. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota

1. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakan program bangga kencana
2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan program bangga kencana
3. Peningkatan kelembagaan pada kab/kota yang memiliki dinas pengendalian penduduk dan kb yang utuh
4. Peningkatan kualitas penggerakan tim advokasi terpadu program bangga kencana
5. Pembinaan dan evaluasi kinerja penyuluh kb/plkb
6. Pembinaan peningkatan kualifikasi institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (ppkdb dan sub ppkdb)
7. Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional
8. Penguatan tupoksi dan kinerja ipekb dan penyuluh kb/plkb
9. Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan sertapemanfaatan basis data keluarga Indonesia
10. SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
11. Verifikasi dan validasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting
12. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting

Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern

Angka prevalensi kontrasepsi modern (mcpr) :67,39%

1. Pemerintah Daerah mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (*stakeholders*), KIE, serta penyediaan data informasi dan keluarga
2. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
3. Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
4. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota

1. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakan program bangga kencana
2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan program bangga kencana
3. Peningkatan kelembagaan pada kab/kota yang memiliki dinas pengendalian penduduk dan kb yang utuh
4. Pembinaan dan evaluasi kinerja penyuluh kb/plkb
5. Pembinaan peningkatan kualifikasi institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (ppkdb dan sub ppkdb)
6. Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional
7. Penguatan tupoksi dan kinerja ipekb dan penyuluh kb/plkb
8. Peningkatan Kualitas Penyebaran Informasi, Dokumentasi dan pengelolaan PPIID
9. Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan sertapemanfaatan basis data keluarga Indonesia
10. SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
11. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting dan keluarga resiko stunting

Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Indeks pembangunan keluarga (ibangga) :
54,38 (skala 0-100)

1. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
2. Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota

1. Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan sertapemanfaatan basis data keluarga
2. SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB diseluruh tingkatan wilayah

1. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program bangga kencana : 22 stakeholder/mitra
2. Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana : 65%
3. Persentase penyuluh kb yang berkinerja baik : 65%
4. Jumlah pengelolaan sistem informasi keluarga (siga) : 15 kab/kota
5. Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem teknologi dan informasi di tk. Provinsi dan kabupaten/kota : 100 %
6. Jumlah penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan kab/kota : 16 kegiatan
7. Jumlah data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi : 1 dokumen (498 kampung kb)
8. Jumlah kampanye percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan : 1 layanan (41 kegiatan)
9. Jumlah layanan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia : 1 layanan (15 kab)

1. Pemerintah Daerah mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja pemangku kebijakan (*stakeholders*), KIE, serta penyediaan data informasi dan keluarga
2. Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
3. Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
4. Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi
5. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota



Bandar Lampung, 24 Maret 2022

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung



Drs. Rudy Budiman
Nip. 19620620 199103 1 003

1. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakan program bangga kencana
2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan program bangga kencana
3. Peningkatan kelembagaan pada kab/kota yang memiliki dinas pengendalian penduduk dan kb yang utuh
4. Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
5. Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Online serta Media Luar Ruang
6. Peningkatan kualitas penggerakan tim advokasi terpadu program bangga kencana
7. Pembinaan dan evaluasi kinerja penyuluh kb/plkb
8. Pembinaan peningkatan kualifikasi institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (ppkdb dan sub ppkdb)
9. Pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional
10. Penguatan tupoksi dan kinerja ipekb dan penyuluh kb/plkb
11. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi data dan informasi Program BanggaKencana
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan jaringan STIK program BanggaKencana
13. Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaansertapemanfaatan basis data keluarga Indonesia
14. SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
15. Verifikasi dan validasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting
16. Kampanye Percepatan Penurunan Stunting dan keluarga resiko stunting